ABSTRAK

Nur Asih. 2022. *Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Fungsi Legislasi Perspektif Maslahah Mursalah.* Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) H. Bahran, S.H, M.H. (II) Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Maslahah Mursalah.

Skripsi ini membahas tentang hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam fungsi legislasi perspektif maslahah mursalah. Hubungan disini dimaknai sebagai hubungan yang bersifat undang-undang, dimana terdapat proses yang dianggap tidak sesuai mengenai fungsi legislasi DPR dan DPD, fungsi legislasi harus dapat dilihat secara penuh yaitu dengan dimulainya proses pengajuan sampai dengan menyetujui rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang. Berdasarkan permasalahan ini, peneliti berusaha mengkaji berkaitan dengan ketidakseimbangan fungsi legislasi DPR dan DPD dalam hal kemanfaatan DPD di dalam melaksanakan fungsi legislasi.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pokok bahasan pada penelitian ini yakni Pasal 22D. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni dengan menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan atau yang berkaitan dengan fungsi legislasi DPR dan DPD. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan cara mencari, meneliti, dan mempelajari berbagai dokumen-dokumen, selain itu juga dengan studi pustaka, yaitu dengan menelusuri bahan hukum dengan cara membaca, melihat, menelaah, dan melakukan penelusuran dari berbagai literatur atau buku-buku yang memiliki hubungan atau keterkaitannya dengan pokok pembahasan mengenai pandangan maslahah mursalah pada hubungan DPR dan DPD dalam fungsi legislasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam fungsi legislasi perspektif maslahah mursalah tidaklah seimbang dan keberadaan DPD dalam fungsi legislasi tidak maksimal, hal ini disebabkan karena tugas dan wewenang DPD dalam bidang legislasi tidaklah sempurna dalam proses legislasinya.